



IDN/ANTARA

PERAGAAN BUSANA WASTRA NUSANTARA DI BALI

Model memperagakan busana berbahan wastra nusantara dalam Indonesia Fashion Parade di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (6/11). Kegiatan yang mengangkat tema "Colourful Indonesia" tersebut menampilkan beragam busana wastra nusantara hasil rancangan 12 perancang busana dari berbagai daerah di Indonesia itu untuk melestarikan budaya Indonesia dan membantu para pelaku usaha di bidang tersebut bangkit saat pandemi COVID-19.

Mulai Senin Ini, Semua SD, TK dan PAUD di Kab. Tangerang Boleh PTM

PTM jenjang sekolah dasar di Kabupaten Tangerang digelar mulai Senin (8/11), dilakukan dengan pertimbangan suksesnya PTM terbatas tingkat SMP yang digelar dalam dua bulan terakhir ini. Sebanyak 1.090 SD, meliputi 749 SD negeri dan 341 SD swasta termasuk TK/ dan PAUD diizinkan untuk menggelar PTM terbatas.

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kabupaten Tangerang mengizinkan seluruh sekolah dasar (SD)/ sederajat di Kabupaten Tangerang untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Senin (8/11). Hal itu seiring dengan penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat

(PPKM) terbaru yang menunjukkan Kabupaten Tangerang masuk level 1.

"Sesuai Inmendagri (Instruksi Mendagri) dan Instruksi Bupati, karena Kabupaten Tangerang sudah masuk PPKM level 1, sekolah jenjang SD sudah boleh melaksanakan PTM terbatas," ujar Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Syaifulah melalui pesan singkat, Minggu (7/11).

Selain PPKM Level 1, PTM jenjang sekolah dasar yang digelar mulai Senin (8/11) tersebut dilakukan dengan pertimbangan suksesnya PTM terbatas tingkat SMP yang digelar dalam dua bulan terakhir ini.

Syaifulah menuturkan, jumlah SD di Kabupaten Tangerang yang menggelar PTM pada Senin (8/11) sebanyak 1.090 SD, meliputi 749 SD negeri dan 341 SD swasta. Selain jenjang SD, dia mengatakan, jenjang Taman Kanak-Kanak (TK)/ dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tangerang juga diizinkan untuk menggelar PTM terbatas.

"Jenjang TK/ RA dan PAUD juga sudah boleh melaksanakan PTM terbatas,

dengan ketentuan penerapan proses sesuai aturan," terangnya.

Aturan itu, kata Syaifulah mengacu pada Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan di Masa Pandemi Covid-19. Diantaranya pembatasan kapasitas siswa di dalam kelas.

Untuk jenjang SD diwajibkan melaksanakan PTM dengan kapasitas 50 persen dari jumlah peserta didik. Sementara untuk TK/ PAUD melaksanakan dengan kapasitas 33 persen dengan jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima orang peserta didik per kelas.

Selain itu, tiap satuan pendidikan diharuskan membenarkan tugas penanganan Covid-19 serta dapat melibatkan orang tua/ wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Jika ada temuan kasus Covid-19 di sekolah, wajib melaporkannya kepada satgas penanganan Covid-19, Dinas Pendidikan, dan atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid mengatakan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas mewajibkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi Covid-19 secara lengkap.

"Apabila terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang belum dilakukan vaksinasi covid, tenaga kependidikan disarankan untuk memberikan layanan pembelajaran jarak jauh," kata Maesyal. ● yan

ANTISIPASI DAMPAK LA NINA

Kapolda Banten Bentuk Tim Bencana Alam

SERANG (IM)- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi tentang dampak fenomena La Nina di sejumlah wilayah Indonesia yang potensial terjadi pada akhir 2021 hingga Mei 2022. La Nina berakibat pada meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia dan membuat musim hujan terjadi lebih lama. Dampak negatif yang diprediksi terjadi seperti meningkatnya volume air sungai, sehingga dapat meluap.

Kapolda Banten, Irjen Pol Rudy Heriyanto, mengaku telah memberi peringatan kepada seluruh personel baik di Polda maupun di Polres jajaran untuk senantiasa siaga menghadapi kontijensi bencana alam. "Personel sudah harus menyiapkan diri menghadapi kontijensi bencana alam, cek kesiapan peralatan dan lakukan pelatihan kepada personel untuk yakin secara fisik personel siaga bencana," katanya, Minggu (7/11).

Selain itu, Kapolres jajaran diminta untuk memetakan wilayah yang potensial terjadi banjir dan tanah longsor. "Tolong para Kapolres mapping wilayahnya yang potensial terjadi bencana

banjir dan longsor, sehingga kita dapat menyusun rencana kontijensi pada daerah rawan bencana tersebut," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya telah membentuk tim bencana alam untuk membantu masyarakat dengan mengorganisir Karoops Polda Banten, Kombok Pol Amiluddin Roemtaat dan para Kapolres untuk melakukan konsolidasi dengan BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemda, Badan SAR dan instansi terkait lainnya dan mempersiapkan semua sumber daya yang dimiliki dalam menghadapi dampak dari fenomena La Nina di wilayah Banten.

"Kami akan segera konsolidasi dengan instansi terkait, diawali secara virtual pada Senin (8/11) dan dilanjutkan dengan pelaksanaan apel kesiapsiagaan bencana antar instansi," paparnya.

Sebagaimana diketahui, pada September 2021 dan Oktober 2021, beberapa bencana banjir telah dilaporkan terjadi di wilayah Banten. Pada 14 September 2021, banjir terjadi di Kecamatan Rangkasbitung, Kalanganyar dan Cibadak di Kabupaten Lebak dan menggenangi 1.162 rumah. ● pra

Data dan Norek Guru Banten Bocor di Situs e-Book

SERANG (IM)- Data guru di Banten bocor dan diunggah di situs vbook.pub yang menawarkan data e-book gratis. Data itu ternyata mengandung virus malware jika diakses. Data guru ini khususnya guru yang ada di Kabupaten Tangerang. Ada oknum diduga sengaja mengunggah data pribadi hingga nomor rekening (norek) milik para guru.

Kepala Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (TIIPK) Dindikbud Banten, Tito Istianto mengatakan bahwa ada kekeliruan mengenai informasi yang disampaikan di beberapa media mengenai situs Dindikbud Banten yang mengandung malware dan dilarang diakses.

Dia menegaskan informasi itu salah karena malware yang sebenarnya ada di situs vbook.pub yang menampilkan data mengenai informasi guru. Saat data itu diakses dan dibuka, ternyata ada data itu ada malware. "Bukan website Dindikbud. Ada semacam platform, diunggah oleh terduga kaitan dengan dokumen pribadi guru. Jadi itu sebetulnya bukan diunggah di website Dindik. Ada platform kayak i-cloud, tapi bukan punya Dindikbud,

itu biasa diakses bisa diunggah siapa pun. Kemarin saya sempat baca berita yang dibuka website Dindikbud. Ada kekeliruan, bukan website-nya," ujar Tito saat dikonfirmasi, Minggu (7/11).

La mengaku kaget soal informasi yang disebar mengenai situs resmi Dindikbud Banten yang tidak bisa diakses tersebut. Ia tegaskan bahwa laman resmi itu aman lantaran dokumen yang mengandung malware tidak ada di situs Dindikbud Banten. "Saya kaget kok website Dindikbud. Saya telusuri, ternyata bukan website Dindikbud. Website Dindikbud aman karena dokumen diunggahnya bukan di situ (vbook.pub)," tutur Tito.

Karena dokumen guru itu tersebar, pihaknya tengah menyelidiki motif dan orang yang mengunggah di situs tersebut. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Polda Banten. Kepala Seksi Evaluasi TIIPK Dindikbud Banten, Herdi Herdiansyah menyampaikan website Dindikbud Banten bisa diakses dan aman. Dia menjelaskan data mengandung malware ada di situs vbook.pub yang isinya berupa data pribadi dan norek milik guru di Tangerang. "Web Dindik tidak menampilkan data itu," ujar Herdi. ● pra

Segel Dibuka, Siswa SDN Kiarapayung Tangerang Bisa PTM

TANGERANG (IM)- Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menjamin 1.000 siswa SDN Kiarapayung, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, bisa sekolah tatap muka, Senin (8/11) ini.

"Segel sekolah sudah dibuka, dan siswa SDN Kiarapayung bisa bersekolah seperti SD lainnya," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Saifulah, Minggu (7/11).

Saifulah mengatakan, segel sekolah dibuka setelah ada perundingan antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dan pemda.

Dalam negosiasi itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan Camat Pakuhaji berdialog dengan keluarga ahli waris pada Selasa (2/11) lalu.

Menurut Saifulah, dalam perundingan itu disepakati ahli waris mengizinkan sekolah dibuka kembali dan digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar. "Sampai menunggu proses pergantian lahan sekolah oleh Pemkab Tangerang," kata Saifulah.

Mulai besok Pemkab Tangerang juga menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas untuk 1.090 SD negeri dan swasta serta PAUD. PTM terbatas digelar setelah Kabupaten Tangerang masuk PPKM Level 1.

Sengketa tanah yang berujung sekolah disegel itu bermula saat tujuh orang anggota keluarga Miing menggugat Bupati Tangerang, Camat Pakuhaji, dan Kepala Desa Kiara Payung pada Pengadilan Negeri Tangerang pada 13 November 2019. Para penggugat mengklaim sebagai pemilik sah tanah seluas 5 ribu meter persegi yang kini menjadi SD Negeri Kiarapayung. Mereka menuntut pemerintah kabupaten memberikan ganti rugi sebesar Rp 6 miliar.

Pengadilan Negeri mengabulkan sebagian gugatan itu pada 9 Juni 2020. Pengadilan memutuskan para penggugat sebagai pemilik sah tanah tersebut dan pemerintah Tangerang diperintahkan membayar ganti rugi pada seluruh penggugat.

Pemerintah Kabupaten Tangerang kemudian mengajukan banding pada 6 Juli 2020. Namun, pada 18 Januari 2021, Pengadilan Tinggi Banten justru memperkuat putusan Pengadilan Negeri.

Kuasa Hukum Amja bin Miing, Sepri Ardi Tanjung, mengatakan penyegelan SD Negeri Kiarapayung merupakan langkah terakhir. Sebab, pemerintah Tangerang mengabaikan putusan Pengadilan. Pemerintah kabupaten juga

menunda pembayaran ganti rugi atas lahan itu dengan dalih menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid mengatakan pembayaran ganti rugi SDN Kiarapayung, Kecamatan Pakuhaji akan diselesaikan tahun 2022 mendatang. "Kami targetkan selesai (pembayaran) dan dianggarkan dalam APBD murni 2021," ujarnya.

Maesyal menyatakan Pemkab Tangerang akan mematuhi dan melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Banten yang telah inkrah tersebut dengan membayar ganti rugi kepada penggugat.

Menurut Maesyal, Pemkab Tangerang baru menerima salinan putusan banding Pengadilan Tinggi Banten pada Maret 2021. Sehingga, kata dia, saat itu APBD murni telah berjalan.

Kabupaten Tangerang pada APBD perubahan 2021 ini hanya mengalokasikan untuk kebutuhan appraisal atau pengukuran dan penilaian tanah yang dilakukan tim appraisal." Jadi tahun ini kami selesaikan dulu proses appraisalnya. Inikan untuk acuan berapa nominal yang harus kami bayarkan. Tahun depan baru pembayaran," kata Maesyal. ● pp



IDN/ANTARA

AGROWISATA BANYUROTO MAGELANG

Pengunjung memetik buah stroberi di kawasan Agrowisata Banyuroto, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (7/11). Agrowisata Banyuroto yang menawarkan petik buah stroberi langsung dari kebun dengan pemandangan Gunung Merapi dan Merbabu tersebut menjadi destinasi favorit kawasan wisata lereng Gunung Merbabu.

Sejumlah ASN Banten Was-was

tak Lagi Dapat Undangan Pelantikan

SERANG (IM)- Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten yang sempat menerima undangan pelantikan dan mendapatkan link untuk mengikuti pelantikan secara virtual, Kamis (4/11) kemarin, kini mengaku was-was.

Pasalnya, hingga saat ini mereka tidak mengetahui lagi apakah untuk pelantikan yang sempat ditunda secara tiba-tiba itu, akan kembali menerima surat undangan pelantikan atau mendapatkan link untuk ikut dalam pelantikan secara virtual yang rencananya akan dilakukan oleh Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy. "Kalau boleh jujur tentu saja kami kecewa karena pelantikan yang rencananya dilakukan hari Kamis (4/11) lalu itu kami sudah datang ke rumah dinas Gubernur, namun tiba-tiba pelantikan dibatalkan melalui pesan whatsapp," ungkap seorang pejabat eselon 3 yang enggan dituliskan namanya, Minggu (7/11).

Menurut sumber tersebut, alasan yang dikeluarkan oleh BKD bahwa pembatalan pelantikan karena kesibukan Gubernur kurang dapat diterima karena pada hari yang sama malah dilakukan pelantikan terhadap 4 orang pejabat. Yaitu, dua pejabat eselon 2 dan dua orang lagi pejabat eselon 3. "Kalau yang saya baca di media online, alasan pembatalan atau penjadwalan ulang pelantikan karena pak Gubernur sibuk. Tapi herannya, pada hari itu malah dilakukan pelantikan terhadap 4 orang pejabat," cetusnya.

Hal senada diungkapkan oleh salah seorang staf pelaksana di salah satu OPD yang mengaku mendapatkan link pelantikan virtual untuk ikut dilantik menjadi pejabat eselon 4, namun tiba-tiba pelantikan dibatalkan. "Mudah mudahan ini hanya penjadwalan ulang pelantikan, bukan kocok ulang," katanya.

Sebelumnnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, DR H Komarudin menjelaskan, penundaan pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) bukan karena adanya isu jual beli jabatan atau tarik menarik kepentingan antara Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy, melainkan semata mata karena padatnya agenda Gubernur dan Wakil Gubernur saat itu. "Ketika itu agenda pak Gubernur sangat padat sekali, di antaranya di hari yang sama ada pelantikan pengurus Kwartir Daerah (Kwarda) Banten yang dihadiri oleh dua orang mantan Jenderal polisi," terang Komarudin, Jumat (5/11) lalu.

Menurut Komarudin, meski pelantikan pejabat eselon 3 dan eselon 4 sempat tertunda, bukan berarti pelantikan tersebut batal melainkan dijadwal ulang yang nantinya akan dilantik oleh Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy yang waktunya akan disesuaikan dengan jadwal Wagub. "Sesuai arahan pimpinan, nanti pejabat eselon 3 dan eselon 4 akan dilantik oleh pak Wagub dan tunggu surat undangan," tukasnya. ● pra

Basarnas Banten Masih Cari Wisatawan yang Terseret Ombak di Pantai Sawarna

LEBAK (IM)- Badan SAR Nasional (Basarnas) Banten melakukan operasi pencarian dan evakuasi wisatawan dari Bekasi, Jawa Barat yang terseret ombak dan tenggelam di pesisir kawasan Sawarna, Bayah, Kabupaten Lebak. "Kami sejak pagi hingga siang ini masih melakukan evakuasi dan belum menemukan wisatawan itu," kata Humas Basarnas Banten Wahyu di Lebak, Minggu.

Peristiwa kecelakaan laut itu dua wisatawan dari Bekasi Jawa Barat, Minggu (7/11) sekitar pukul 06.30 WIB berenang di Pantai Cianjur, kawasan Sawarna, Bayah, Kabupaten Lebak. Kedua wisatawan itu, satu di antaranya dapat diselamatkan namun seorang lagi menghilang terseret ombak ke tengah laut Pantai Cianjur Kawasan Sawarna.

Basarnas Banten bersama relawan penyelamat pantai juga

TNI, Polri, BPBD setempat hingga nelayan melakukan pencarian dan pertolongan kepada wisatawan itu.

Wisatawan yang terseret bernama Dzikri (21) alamat Jalan Sapiul Kelurahan Jati Cempaka Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. "Kami berharap wisatawan yang menghilang terseret ombak itu ditargetkan hari ini bisa ditemukan jika gelombang normal," kata Wahyu.

Menurut dia, Basarnas Banten menggunakan alat yang digunakan untuk melakukan evakuasi Rescue Car, Palsar Air, Palsar Komunikasi, Palsar Medis dan APD Hazmat.

Selama ini, cuaca di selatan Lebak berawan dengan arah angin barat laut dengan ketinggian gelombang 2,5 sampai 4 meter. "Kami bekerja keras agar wisatawan yang menjadi korban kecelakaan laut dapat ditemukan," katanya menjelaskan. ● pra



IDN/ANTARA

PENGEMBANGAN WISATA DI PONDOK PESANTREN

Sejumlah santriwati bercengkerama di salah satu rumah lumbung Pondok Pesantren Tahfidz Ki Marogan Palembang, Sumatra Selatan, Minggu (7/11). Kawasan wisata alam dan rumah lumbung di Ponpes Tahfidz Ki Marogan dipersiapkan menjadi destinasi wisata bagi masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren.

Pilkades 679 Desa Aman dan Kondusif, Kapolda Banten Apresiasi Pengamanan

SERANG (IM)- Pemilihan Kepala Desa serentak di Provinsi Banten telah usai digelar Oktober 2021 dan berlangsung aman. Kapolda Banten, Irjen Rudy Heriyanto mengucapkan terima kasih atas kerja keras anggota keamanan.

Pilkades dilaksanakan di 679 desa di Banten, terdiri dari 64 desa di Kabupaten Tangerang, 206 desa di Kabupaten Pandeglang, 265 desa di Kabupaten Lebak, dan 144 desa di Kabupaten Serang. "Saya sebagai pimpinan Polda Banten mengapresiasi dan berterimakasih dengan tulus kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan rangkaian Pilkades di Banten. Semoga pengabdian kita ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua dan menjadi wujud pelayanan kita untuk masyarakat, bangsa dan negara," kata Kapolda, Sabtu (6/11).

Pengamanan pilkades dilakukan ribuan personel kepolisian, bekerjasama dengan TNI dan Pemda. Kapolda menegaskan para personel keamanan bertindak profesional dengan mengikuti strategi dan arahan Polda Banten. "Terkait pandemi covid-19, saya telah menginstruksikan semua Kapolres untuk memprioritaskan pelaksanaan vaksinasi bagi warga di desa pemilihan dan meminta peran tiap kepala daerah untuk menyediakan gerai-gerai vaksin di TPS serta pemenuhan sarana protokol kesehatan di tiap-tiap TPS," kata Rudy.

Pola pengamanan juga telah diformulasikan adaptif dengan hasil pemetaan terhadap kerawanan yang ada. Ribuan personel

Polda Banten dilibatkan dalam pengamanan TPS, dan penugasan pasukan taktis. Kapolda Banten memuji personel Brimob dari Satbrimob dan Korps Brimob. Mereka diterjunkan terutama pada tempat-tempat pemilihan yang dikategorikan sangat rawan dari hasil pemetaan. "Aktivitas personel Brimob yang senantiasa patroli bermotor di berbagai tempat telah mereduksi peluang pihak lain yang ingin mengganggu keamanan dan ketertiban selama Pilkades berlangsung," tutur Kapolda.

Strategi lainnya, Kapolda Banten menugaskan para pejabat utama Polda Banten untuk menjadi pengamat wilayah di tiap-tiap polsek saat Pilkades. Mereka berperan tidak hanya sebagai supervisor namun juga menjadi problem solver bila terjadi permasalahan di desa pemilihan termasuk mengambil keputusan bila berhadapan dengan kontijensi tertentu.

"Saya telah perintahkan seluruh pejabat utama Polda Banten untuk turun menjadi supervisor pengamanan di tiap Polsek, sekaligus memberi masukan dan pendampingan bagi para kapolres menjalankan manajemen pengamanan dengan baik," jelas Rudy.

Kabidhumas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga mengungkapkan Kapolda Banten juga memberikan perhatian khusus bagi personel pengamanan di tiap TPS untuk tidak membawa senjata api, sehingga dapat menghindari terjadinya tindakan eksekusi dari personel. Selain itu, setiap personel harus bersikap netral, tidak memihak calon kades. ● pra